

**PERAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DIKELURAHAN
SELAT TANJUNG MEDAN KECAMATAN DATUK
BANDAR TIMUR KOTA TANJUNGBALAI**

TESIS

OLEH

**RAHMAT RAMBAT
NPM. 171801126**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)25/8/23

ABSTRAK

PERAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN SELAT TANJUNG MEDAN KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR KOTA TANJUNGBALAI

Nama : RAHMAT RAMBAT
NPM : 171801126
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Pembimbing I : Prof. Dr. Marion Sihombing, MA
Pembimbing II : Dr. Warjio, MA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan peran pemerintah kelurahan dan faktor – faktornya dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur kota Tanjungbalai. Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran faktual dengan argument yang tepat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran melalui proses analisis untuk memahami peran pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur kota Tanjungbalai. Hasil penelitian ini menunjukkan Peranan pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari beberapa indikator, yakni bina usaha. Pemberdayaan masyarakat melalui bina usaha berfokus pada pengembangan usaha kelompok dengan memberikan pinjaman modal baik ditujukan untuk kelompok simpan pinjam maupun kelompok tani, bina usaha dibidang pertanian diwujudkan dengan berbagai macam bantuan yang diberikan baik pemberian modal ataupun dalam bentuk bantuan bibit, pupuk, serta ada pula asuransi padi yang tersedia. Adapun faktor yang mempengaruhi peranan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Peran dari faktor pendukung ini adalah melalui partisipasi masyarakat tentunya bertujuan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, kesadaran masyarakat untuk mendukung sepenuhnya kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah kelurahan, dan tingkat pendidikan dari keterampilan yang dimiliki masyarakat. Sedangkan faktor penghambat akibat dari keterbatasan anggaran dan solusi mengatasinya dengan menyediakan sarana transportasi dari pihak pemerintah kelurahan. Selanjutnya pola pikir masyarakat dalam berkegiatan sehingga cara mengatasinya dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan aturan yang mengikat sebagai faktor penghambat. Cara mengatasinya dengan mengatur jadwal kepada masyarakat untuk meluangkan waktu ketika melaksanakan kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat.

ABSTRACT

THE ROLE OF VILLAGE GOVERNMENT IN COMMUNITY EMPOWERMENT IN SELAT TANJUNG MEDAN VILLAGE IN DATUK BANDAR TIMUR SUBDISTRICT TANJUNGBALAI CITY

Name : RAHMAT RAMBAT
NPM : 171801126
Study Program : Magister Ilmu Administrasi Publik
Adviser I : Prof. Dr. Marion Sihombing, MA
Adviser II : Dr. Warjio, MA

This study aims to find out and describe the role of the village government and its factors in community empowerment in Selat Tanjung Medan Subdistrict Datuk Bandar Timur Subdistrict, Tanjungbalai City. The author conducted this study by using qualitative research with a type of descriptive research, which is a study that aims to provide a factual description with the right argument. Therefore, this study aims to obtain an overview through the analysis process to understand the role of the village government in community empowerment in the Selat Tanjung Medan Village, Datuk Bandar Timur Subdistrict, Tanjungbalai City. The results of this study indicate the role of the village government in community empowerment can be seen from several indicators, namely business development. Community empowerment through business development focuses on developing group businesses by providing capital loans, both aimed at savings and loan groups and farmer groups, fostering business in agriculture realized with various kinds of assistance provided either in the form of capital or in the form of seeds, fertilizers and insurance rice available. The factors that influence the role of government in community empowerment consist of supporting factors and inhibiting factors. The role of this supporting factor is that through community participation it is of course aimed at achieving a prosperous society, community awareness to fully support the empowerment activities carried out by the kelurahan government, and the level of education of community-owned skills. While the inhibiting factor of effect is from budget constraints and the solution is to overcome it by providing transportation facilities from the village government. Furthermore, the mindset of the community in conducting activities is a way to overcome them by socializing to the community, and binding rules as an inhibiting factor. The solution is to arrange a schedule for the community to spend time when carrying out activities in community empowerment.

Key words: The Role of Village and Community Empowerment

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)25/8/23

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	
HALAMAN SAMPUL DALAM	
HALAMAN SETELAH SAMPUL DALAM	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
HALAMAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
HALAMAN MOTTO	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR	i
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iii
ABSTRAK.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Fokus Penelitian	8
1.3. Rumusan Masalah	8
1.4. Tujuan Penelitian.....	9
1.5. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Dasar Teoretis.....	11
2.1.1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat	11
2.1.2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat	13
2.1.3. Proses Pemberdayaan Masyarakat	15
2.1.4. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat.....	17
2.1.5. Pemerintah Kelurahan	18
2.1.6. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kelurahan	22
2.1.7 Peran Pemerintah Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat.....	25
2.2. Dasar Konseptual	30
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Desain Penelitian	34
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian	34
3.1.1. Tempat Penelitian.....	34
3.1.2. Waktu Penelitian	35
3.3. Subyek Penelitian	35

3.4. Teknik Pengumpulan Data	37
3.5. Analisis Data	39
3.6. Keabsahan Penelitian	39
3.7. Prosedur Penelitian	40
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
4.2. Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Selat Tanjung Medan	51
4.2.1. Bina Usaha Koperasi Simpan Pinjam	54
4.2.2. Bina Usaha Mengelola Limbah Daur Ulang	62
4.2.3. Bina Usaha Menjahit	69
4.2.4. Bina Usaha Mengolah Limbah Kerang	75
4.3. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Peran Pemerintah Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Selat Tanjung Medan	83
4.3.1 Faktor Pendukung	84
4.3.1.1. Partisipasi Masyarakat	84
4.3.1.2. Kesadaran Masyarakat	86
4.3.1.3. Tingkat Pendidikan	88
4.3.2. Faktor Penghambat	89
4.3.2.1. Keterbatasan Anggaran	89
4.3.2.2. Pola Pikir Masyarakat	90
4.3.2.3. Aturan Yang Mengikat	91
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	94
5.2. Saran	95
 DAFTAR PUSTAKA	 917
DAFTAR LAMPIRAN	99-118

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional, pemerintah memberikan perhatian yang sebesar-besarnya pada pembangunan di wilayah lingkungan kelurahan. Perhatian yang besar terhadap wilayah lingkungan kelurahan itu didasarkan pada kenyataan bahwa wilayah kelurahan merupakan tempat berdiamnya sebagian besar rakyat Indonesia. Kedudukan wilayah kelurahan yang merupakan bagian dari daerah kabupaten/ kota menjadi salah satu dasar landasan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerahnya. Selain itu fokus pemerintah daerah kepada masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat proses pembangunan daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah tidak terlepas dari peranan pemerintah kelurahan sebagai pendukung utama untuk keberhasilan pembangunan nasional.

Pada hakekatnya kelurahan merupakan lembaga satuan terkecil diantara perangkat daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada konteks otonomi daerah perangkat daerah terdiri atas Kabupaten/ Kota, Sekretariat daerah, Sekretariat DPRD, Dinas,

Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan (Pasal 120 ayat 2, UU 32 tahun 2014). Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005. Disebutkan lurah haruslah memiliki syarat-syarat berupa kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan memahami kondisi sosial budaya masyarakat setempat, selain itu masa kerja minimal 10 tahun dan pangkat/golongan minimal III/ c (pasal 4).

Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur kota Tanjungbalai ini dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Lurah dalam pemberdayaan masyarakat mengalami kendala atau permasalahan yang di hadapi. Maka, penulis mencoba untuk mengkaji permasalahan yang terjadi di kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur kota Tanjungbalai yaitu komunikasi antara pihak kelurahan dan masyarakat yang kurang baik serta jadwal pengawasan dan pengembangan usaha, ternak, serta perdagangan di kawasan kelurahan untuk menunjang peran Lurah dalam pemberdayaan masyarakat itu sendiri, serta terbatasnya dana yang ada yang membuat kurangnya aktifitas kelurahan untuk mengawasi serta melaksanakan pembinaan dan pengarahan dalam pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pengamatan penulis masyarakat di kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur kota Tanjungbalai masih memiliki banyak permasalahan antara lain:

1. Masih adanya masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan

Berdasarkan data statistik (*BPS Kota Tanjungbalai*) tahun 2018 di kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur masih terdapat penduduk miskin sebanyak 204.091 jiwa (22,90 %) atau 51.025 rumah tangga miskin (RTM).

2. Meningkatnya angka pengangguran

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat per Desember 2018 menunjukkan jumlah pengangguran terhitung mencapai 5,92 persen yaitu sebanyak 7.017 orang dari total angkatan kerja yang mencapai 121.200 orang. Terdapat 360 ribu orang lulusan perguruan tinggi dan tamatan SD, SMP, dan SMA SMK menjadi pengangguran.

3. Kurangnya kesadaran masyarakat atas kebersihan lingkungan.

Salah satu masalah lingkungan yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari adalah masalah sampah. Setiap manusia, memiliki potensi untuk memproduksi sampah. Semakin banyaknya kegiatan manusia akan semakin banyak jumlah sampah yang diproduksi. Pertambahan jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat akan menimbulkan volume, jenis, dan karakteristik sampah yang akan semakin beragam.

Dengan melihat kenyataan di atas maka jumlah penduduk di Kelurahan Selat Tanjung Medan adalah kelurahan yang memiliki penduduk miskin tertinggi dibandingkan dengan kelurahan – kelurahan lainnya di kecamatan Datuk Bandar Timu. Untuk itu penulis perlu melakukan penelitian agar diketahui faktor-faktor penyebab kemiskinan yang sebenarnya di Kelurahan Selat Tanjung Medan. Data

UNIVERSITAS MEDAN AREA
 repository.uma.ac.id
 tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1
Jumlah Keluarga Miskin per Kelurahan
di Kecamatan Datuk Bandar Timur Tahun 2018

No	Kelurahan	Jumlah Keluarga (KK)	Keluarga Miskin (KK)	Kepadatan (jiwa/km ²)
1	Kelurahan Selat Lancang	7.743	488	1.516
2	Kelurahan Selat Tanjung Medan	8.857	1.500	2.875
3	Kelurahan Semula Jadi	6.249	937	1.866
4	Kelurahan Pulau Simardan	5.210	789	789
5	Kelurahan Bunga Tanjung	5.637	991	2.832

(Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tanjungbalai 2018)

Berdasarkan tabel 1.1 yang dipaparkan di atas terdapat lima kelurahan yang ada di kecamatan Datuk Bandar Timur kota Tanjungbalai yaitu; kelurahan Selat Lancang yang jumlah keluarga di tahun 2018 sebesar 7.743 KK dan keluarga miskin dengan jumlah 488 KK sehingga membentuk kepadatan jiwa 1.516 km². Selanjutnya adalah di kelurahan Selat Tanjung Medan yang paing besar jumlah penduduk miskin yaitu 8.857 KK dan keluarga miskin berjumlah 1.500 KK dengan kepadatan jiwa 2.875 km². Kelurahan Semula Jadi yaitu 6.249 KK dan 937 jumlah keluarga miskin dengan 1.866 kepadatan jiwa. Sedangkan untuk kelurahan Pulau Simardan jumlah keluarga adalah 5.210 dan untuk keluarga miskin 789 KK dan 789 km² kepadatan jiwa. Kelurahan yang paling akhir adalah kelurahan Bunga Tanjung sebesar 5.637 KK dan 991 KK untuk keluarga miskin dengan 2.832 km² kepadatan jiwa.

Untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di Kelurahan Selat Tanjung Medan berdasarkan paparan penjelasan di atas maka pemerintah kelurahan akan memunculkan program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat di Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur kota Tanjungbalai. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah No.18 Tahun 2013 ayat (2) bagian c dan d yang menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab lurah untuk kesejahteraan rakyat dan pemberdayaan masyarakat. Adapun pemberdayaan masyarakat yang dilakukan lurah adalah kegiatan bina usaha, bina manusia, dan bina lingkungan.

Menurut Mardikanto (2016) pengertian bina usaha adalah bentuk pemberdayaan masyarakat yang menghasilkan peningkatan hasil usaha yang konkrit dari masyarakat setempat yang ditandai dengan adanya perencanaan yang baik, penetapan dan pembagian hasil yang merata serta dilakukan melalui partisipasi aktif dari masyarakatnya. Bina manusia adalah pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan peningkatan kompetensi masyarakat dalam melakukan bina usaha, sehingga pembangunan yang berlangsung merupakan pembangunan masyarakat yang berorientasikan pada pengembangan potensi masyarakat dan dilakukan dari aspirasi masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat secara mandiri. Bina lingkungan adalah pemberdayaan yang menunjang model pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), yakni pembangunan masyarakat yang menjamin terjadinya ketersediaan sumber daya alam secara berkesinambungan bagi generasi yang akan datang melalui

program-program yang berkaitan dengan pelestarian dan pengembangan lingkungan hidup.

Selain permasalahan kemiskinan di kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur kota Tanjungbalai, pendidikan dan ekonomi juga menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti. Dua tabel berikut menjadi bukti bahwa tingkat pendidikan dan perekonomian di kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur kota Tanjungbalai masih tergolong rendah.

Tabel 1.2
Rekapitulasi Pendidikan di Kelurahan Selat Tanjung Medan
Kecamatan Datuk Bandar Timur

No	Tingkat Sekolah	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		Sekolah	Siswa	Guru	Sekolah	Siswa	Guru	Sekolah	Siswa	Guru
1	PAUD	3	60	6	3	70	6	3	59	6
2	SD Negeri	2	458	37	2	428	36	2	400	36
3	SD Swasta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SMP Negeri	1	35	1	1	92	6	1	87	6
5	SMP Swasta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	SMK Negeri	1	501	33	1	507	33	1	497	33
7	SMK Swasta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		7	1.054	77	7	1.097	81	7	1.043	81

Dari tabel 1.2 terlihat bahwa mayoritas tingkat pendidikan penduduk di kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur kota Tanjungbalai yaitu terjadi penurunan dari jumlah siswa pada tahun 2016 sampai dengan 2018 di tiap – tiap tingkat sekolah. Perihal inilah yang menyebabkan tingkat kemiskinan bertambah. Berikutnya adalah dari permasalahan ekonomi yang bisa dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 1.3
Pertumbuhan Ekonomi di Kelurahan Selat Tanjung Medan
Kecamatan Datuk Bandar Timur

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)		
	Pertanian	Perdagangan	Perikanan
2016	5,33	4,31	6,01
2017	5,59	5,14	4,09
2018	5,61	3,31	3,54

Berdasarkan tabel 1.3 di atas, pertumbuhan ekonomi kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur kota Tanjungbalai selama tiga tahun cenderung menurun, hal ini dikarenakan perokonomian kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur kota Tanjungbalai bertumpu pada sektor pertanian, perdagangan, dan perikanan yang lemah.

Selanjutnya untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut maka pemberdayaan masyarakat dengan bina usaha adalah salah satu alternatifnya untuk menjawab permasalahan di Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur kota Tanjungbalai. Adapun bina usaha yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan adalah usaha koperasi simpan pinjam, mengelola limbah daur ulang, mengembangkan nilai – nilai keterampilan (produksi jahit), dan memanfaatkan limbah kerang yang menjadi usaha utama di Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur kota Tanjungbalai.

Melalui pemberdayaan kegiatan bina usaha dilakukan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, sehingga terbebas dari kemiskinan. Hal tersebut merupakan tugas Lurah sebagai pemimpin dalam lingkup kelurahan yang bertanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakatnya sesuai dengan tugas

Upaya tersebut menarik minat penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai”.

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengkajian mengenai peran pemerintah kelurahan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur kota Tanjungbalai.
2. Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur kota Tanjungbalai diambil sebagai wilayah penelitian, terkait dengan peran pemerintah kelurahan berperan pada kegiatan bina usaha.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur kota Tanjungbalai?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peran pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai?

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)25/8/23

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan peran pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur kota Tanjungbalai.
2. Untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi peran pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur kota Tanjungbalai.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan kajian dan referensi yang berkaitan dengan peranan pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

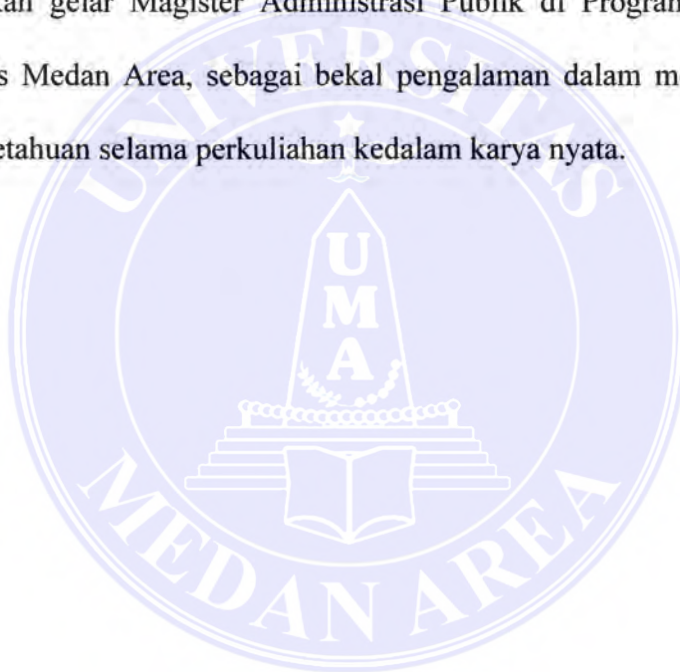
Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk mempraktekkan ilmu pendidikan luar sekolah sebagai acuan penelitian-penelitian selanjutnya dan mengkaji fenomena pemberdayaan masyarakat.

1. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk mengetahui bentuk-bentuk dan hambatan tentang peran dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) sebagai upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini digunakan sebagai syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Magister Administrasi Publik di Program Pascasarjana Universitas Medan Area, sebagai bekal pengalaman dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan kedalam karya nyata.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Dasar Teoretis

2.1.1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Suharto (2016) pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, terutama individu-individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator sebuah keberhasilan pemberdayaan. Proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif (kelompok).

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau proses pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki

UNIVERSITAS MEDAN AREA kurang atau belum berdaya (Sulistiyani, 2016). Terkait

definisi Pemberdayaan masyarakat menurut Widjaja (2018) adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya.

Kartasmita (2016) menyatakan pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "*people-centered, participatory, empowering and sustainable*". Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa lalu.

Selain definisi di atas, terdapat definisi pemberdayaan masyarakat menurut Sumodiningrat (2016) adalah pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mendirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.

Lebih lanjut dikatakan bahwa pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal. Sementara itu Vindyandika (2017) menjelaskan bahwa konsep pemberdayaan dapat dipandang sebagai bagian

UNIVERSITAS MEDAN AREA
 pemberdayaan masyarakat sebagai aliran yang muncul pada paruh abad ke-20 yang lebih

dikenal sebagai aliran postmodernisme. Aliran ini menitikberatkan pada sikap dan pendapat yang berorientasi pada jargon antisistem, antistruktur, dan antideterminisme yang diaplikasikan pada dunia kekuasaan. Pemahaman konsep pemberdayaan oleh masing-masing individu secara selektif dan kritis dirasa penting, karena konsep ini mempunyai akar historis dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan barat.

Berdasarkan beberapa pengertian pemberdayaan yang dikemukakan tersebut, penulis memberi kesimpulan bahwa pada hakekatnya pemberdayaan adalah suatu proses dan upaya untuk memperoleh atau memberikan daya, kekuatan, atau kemampuan kepada individu masyarakat lemah agar dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan dan potensi serta masalah yang dihadapi dan sekaligus memilih alternatif pemecahnya dengan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki secara mandiri.

2.1.2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan/ kesenjangan/ ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi/ layak. Kebutuhan dasar itu, mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Keterbelakangan, misalnya produktivitas yang rendah, sumberdaya manusia yang lemah, terbatasnya akses pada tanah padahal ketergantungan pada sektor pertanian masih sangat kuat, melemahnya pasar-pasar lokal/ tradisional karena

digunakan untuk memasok kebutuhan perdagangan internasional. Dengan

perkataan lain masalah keterbelakangan menyangkut struktural (kebijakan) dan kultural (Sunyoto Usman, 2016). Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri.

Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya atau kemampuan yang dimiliki. Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, dan afektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik atau material. Pelaku pemberdayaan harus dapat berperan sebagai motivator, mediator, dan fasilitator yang baik. Pelaku pemberdayaan tidak hanya dituntut untuk memperdaya pengetahuannya, melainkan mereka dituntut meningkatkan ketrampilannya dalam mendesain pemberdayaan.

Terkait dengan tujuan pemberdayaan, Sulistiyani (2016) menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan sertamelakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki.

Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik/ material. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk dan diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pemberdayaan masyarakat. Kondisi afektif adalah merupakan perasaan yang dimiliki oleh individu yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya mendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan.

2.1.3. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Suharto (2016) pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, terutama individu-individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas

Proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif (kelompok). Proses ini merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasi atau hubungan antara lapisan sosial yang dicirikan dengan adanya polarisasi ekonomi, maka kemampuan individu “senasib” untuk saling berkumpul dalam suatu kelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif (Friedman, 2015). Hal tersebut dapat dicapai melalui proses dialog dan diskusi di dalam kelompoknya masing-masing, yaitu individu dalam kelompok belajar untuk mendeskripsikan suatu situasi, mengekspresikan opini dan emosi mereka atau dengan kata lain mereka belajar untuk mendefinisikan masalah, menganalisis, kemudian mencari solusinya.

Kartasmita mengatakan bahwa proses pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga proses yaitu:

- a Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Titik tolaknya adalah bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya tidak ada sumber daya manusia atau masyarakat tanpa daya. Dalam konteks ini, pemberdayaan adalah membangun daya, kekuatan atau kemampuan, dengan mendorong (*encourage*) dan membangkitkan kesadaran (*awareness*) akan potensi yang dimiliki serta berupaya mengembangkannya.
- b Memperkuat potensi daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*), sehingga diperlukan langkah yang lebih positif, selain dari iklim atau suasana.
- c Memberdayakan juga mengandung arti melindungi. Dalam proses

UNIVERSITAS MEDAN AREA pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh

karena kekurangberdayaannya dalam menghadapi yang kuat (Kartasasmita, 2016). Proses pemberdayaan warga masyarakat diharapkan dapat menjadikan masyarakat menjadi lebih berdaya berkekuatan dan berkemampuan.

2.1.4. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Sumodingningrat (2016) pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai status, mandiri. Tahapan intervensi sosial dalam program pemberdayaan masyarakat merupakan suatu siklus perubahan yang berusaha mencapai ke taraf yang lebih baik.

Menurut Sulistiyani (2016) menyatakan bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut meliputi :

- a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
- b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan pemberian keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
- c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan untuk mengantarkan pada kemandirian.

Menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2017) dengan menekankan pada

proses, maka pemberdayaan masyarakat memiliki tahap-tahap sebagai berikut:

a. Penyadaran

Pada tahap ini, dilakukan sosialisasi terhadap komunitas agar mereka mengerti bahwa kegiatan pemberdayaan ini penting bagi peningkatan kualitas hidup mereka, dan dilakukan secara mandiri (*self help*)

b. Pengkapasitasan

Sebelum diberdayakan, komunitas perlu diberikan kecakapan dalam mengelolanya. Tahap ini sering disebut sebagai *capacity bulding*, yang terdiri atas pengkapasitasan, organisasi, dan system nilai.

c. Pendayaan

Pada tahap ini, target diberikan daya, kekuasaan, dan peluang sesuai dengan kecakapan yang sudah diperolehnya.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan tahapan pemberdayaan masyarakat melalui penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan, sehingga masyarakat mampu mandiri dalam meningkatkan taraf hidup yang lebih baik.

2.1.5. Pemerintah Kelurahan

Soemantri (2017) menjelaskan bahwa pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh melakukan sesuatu. Menurut Utrecht (2015) istilah pemerintahan diartikan sebagai perbuatan dalam artian bahwa cara, hal urusan dan sebagainya dalam memerintah sehingga secara etimologi, dapat diartikan sebagai tindakan yang terus menerus (*kontinue*) atau kebijaksanaan dengan menggunakan suatu rencana maupun akal (*rasio*) dan tata cara tertentu untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki. Sedangkan Yamin (2015)

mendefinisikan bahwa pemerintah ialah jawatan atau aparatur dalam susunan politik.

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan dalam badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif. Sarundajang (2016) dalam bukunya yang terkenal *Comparative Government*, mengatakan bahwa pemerintah harus mempunyai kegiatan terus menerus (*process*), harus mempunyai negara tempat kegiatan itu berlangsung (*state*), mempunyai pejabat pemerintah (*the duty*) dan mempunyai cara, metode, serta sistem (*manner, method, and system*) terhadap rakyatnya.

Tujuan dari pemerintah bahwa pemerintah harus bersikap mendidik dan memimpin yang diperintah, ia harus serempak dijiwai oleh semangat yang diperintah, menjadi pendukung dari segala sesuatu yang hidup diantara mereka bersama, menciptakan perwujudan segala sesuatu yang diinginkan secara samar-samar oleh semua orang, yang dilukiskan secara nyata dan dituangkan dalam kata-kata oleh orang-orang yang terbaik dan terbesar.

Fungsi pemerintahan manjadi empat bagian yaitu;

1. Fungsi pelayanan (*public service*)
2. Fungsi pembangunan (*development*)
3. Fungsi pemberdayaan (*empowering*)
4. Fungsi pengaturan (*regulation*)

Sehingga penulis mermuskan bahwa pemerintah kelurahan adalah pemerintah yang membawahi pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan.

Selanjutnya pengertian Kelurahan menurut Undang – Undang Nomor 23 tahun 2016 pada pasal 229 tentang Pemerintahan Daerah yaitu Kelurahan dibentuk dengan Perda Kabupaten/ Kota berpedoman pada peraturan pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat. Lurah diangkat oleh bupati/ wali kota atas usul sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan pemerintahan kelurahan merupakan pelaksanaan pemerintahan yang dilaksanakan atau dilakukan oleh pemerintah kelurahan. Secara terperinci tugas pokok dari aparatur pemerintah kelurahan adalah sebagai berikut ;

a. Lurah

Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah mempunyai tugas memimpin

UNIVERSITAS MEDAN AREA membina, mengoordinasikan dan melaksanakan

kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati di bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban. Pelayanan masyarakat serta pembinaan sekretariat Kelurahan.

b. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris kelurahan, mempunyai tugas membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan di bidang ketatausahaan, kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, keuangan, serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur dalam lingkup Kelurahan.

c. Kepala Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas membantu lurah dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang pemerintahan.

d. Kepala Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas membantu lurah dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang pembangunan.

e. Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas membantu lurah dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

f. Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas membantu lurah dalam membina, mengoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban.

2.1.6. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kelurahan

Dalam pasal 229 ayat 3 Undang-undang 23 tahun 2014 disebutkan bahwa tugas lurah adalah membantu camat dalam hal:

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Melakukan pemberdayaan masyarakat ;
- c. Melaksanakan pelayanan masyarakat ;
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum ;
- e. Memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat ; dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2005 dijelaskan kedudukan dan tugas dan fungsi pemerintah kelurahan adalah:

1. Pasal 3 Kedudukan Pemerintah Kelurahan:

- (1) Kelurahan merupakan perangkat daerah kabupaten/ kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati/ walikota melalui camat.

- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh bupati/ walikota atas usul camat dari pegawai negeri sipil.
- (4) Syarat-syarat lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pangkat/ golongan minimal penata (iii/ c).
 - b. Masa kerja minimal 10 tahun.
 - c. Kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan
 - d. memahami sosial budaya masyarakat setempat.
2. Pasal 4 Tugas Pemerintah Kelurahan:
 - (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/ walikota.
 - (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
 - (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.
 - (5) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan bupati/ walikota dengan berpedoman pada peraturan menteri.

3. Pasal 5 Fungsi Pemerintah Kelurahan:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, lurah mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelayanan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

4. Pasal 6 Tugas Pemerintah Kelurahan

Lurah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh camat sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pasal 7 Fungsi Pemerintah Kelurahan

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Peraturan Daerah ini, Lurah mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi, terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat Kelurahan dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- b. Pelaksanaan pembinaan, terhadap kegiatan dibidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;

6. Pasal 8 Fungsi Pemerintah Kelurahan

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Peraturan Daerah ini, Lurah mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggaraan kesejahteraan rakyat;

- d. Pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggaraan pembangunan kelurahan;
- e. Pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat;
- f. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan pembinaan pelayanan
 - (1) teknis administrasi kepada seluruh perangkat kelurahan;
- g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan;
- h. Pengolahan administrasi umum dan ketatalaksanaan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.7. Peran Pemerintah Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat

Dalam proses kesejahteraan masyarakat di kelurahan Selat Tanjung Medan kecamatan Datuk Bandar Timur kota Tanjungbalai, peranan pemerintah kelurahan juga sangat besar. Menurut pengamatan terhadap peran pemerintah kelurahan di kelurahan Selat Tanjung Medan kecamatan Datuk Bandar Timur kota Tanjungbalai membuktikan hal itu. Para pemerintah kelurahan yang diteliti menunjukkan bahwa mereka sebagai pengambil prakarsa dalam suatu proyek pembangunan. Mereka mendiskusikan dan seterusnya merapatkan dalam rapat desa untuk mengambil keputusan pelaksanaan suatu proyek.

Pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari Bahasa Inggris, *power* diartikan sebagai kekuasaan atau kekuatan. Menurut Korten (2016) pemberdayaan adalah peningkatan kemandirian rakyat berdasarkan kapasitas dan kekuatan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
 Universitas Medan Area (UMA) tidak material maupun non-material melalui redistribusi

modal. Sedangkan Pranarka dan Vidhyandika (2016) menjelaskan pemberdayaan adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional, maupun dalam bidang politik, ekonomi, dan lain sebagainya.

Menurut Mardikanto (2016) lingkup kegiatan pemberdayaan terdiri dari bina manusia, bina lingkungan, dan bina usaha.

a. Bina Manusia

Bina manusia adalah pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan peningkatan kompetensi masyarakat dalam melakukan bina usaha, sehingga pembangunan yang berlangsung merupakan pembangunan masyarakat yang berorientasikan pada pengembangan potensi masyarakat dan dilakukan dari aspirasi masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat secara mandiri.

Yang termasuk ke dalam upaya bina manusia adalah semua kegiatan yang termasuk dalam upaya penguatan atau pengembangan kapasitas yaitu:

- 1) Pengembangan kapasitas individu, yang meliputi kapasitas kepribadian, kapasitas di dunia kerja, dan pengembangan keprofesionalan
- 2) Pengembangan kapasitas entitas/kelembagaan, yang meliputi:
 - a) Kejelasan visi, misi, dan budaya organisasi
 - b) Kejelasan struktur organisasi, kompetensi dan strategi organisasi
 - c) Pengembangan jumlah dan mutu sumber daya
 - d) Interaksi antar individu di dalam organisasi

e) Interaksi dengan entitas organisasi dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang lain

3) Pengembangan kapasitas sistem (jejaring) yang meliputi:

a) Pengembangan interaksi antar entitas (organisasi) dalam sistem yang sama serta

b) Pengembangan interaksi dengan entitas/organisasi di luar sistem.

b. Bina Lingkungan

Bina lingkungan adalah pemberdayaan yang menunjang model pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), yakni pembangunan masyarakat yang menjamin terjadinya ketersediaan sumber daya alam secara berkesinambungan bagi generasi yang akan datang melalui program-program yang berkaitan dengan pelestarian dan pengembangan lingkungan hidup. Terpenuhinya segala kewajiban yang ditetapkan dalam persyaratan investasi dan operasi yang terkait dengan perlindungan, pelestarian dan pemulihan (rehabilitasi/ reklamasi) sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pembangunan telah membawa dampak negatif sebagai pencemaran lingkungan akibat dari adanya limbah industri dan rumah tangga. Menghadapi kegiatan tersebut, upaya pemberdayaan terhadap kesadaran lingkungan (sumber daya alam dan lingkungan hidup) sudah saatnya memperoleh perhatian yang serius.

c. Bina Usaha

Bina usaha adalah bentuk pemberdayaan masyarakat yang menghasilkan peningkatan hasil usaha yang konkrit dari masyarakat setempat yang ditandai

dengan adanya perencanaan yang baik, penetapan dan pembagian hasil yang merata serta dilakukan melalui partisipasi aktif dari masyarakatnya. Menurut Mardikanto (2016) bina usaha : Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah dengan sertakan partisipasi aktif masyarakat untuk menunjang prasarana/ sarana dan kemudahan-kemudahan lain menunjang peningkatan usaha masyarakat dalam lingkungan yang sudah terbina. Bina Usaha yang diupayakan melalui pemberdayaan masyarakat akan mencakup banyak hal, seperti:

1. Peningkatan pengetahuan teknis, utamanya untuk meningkatkan produktivitas, perbaikan mutu dan nilai tambah produk.
2. Perbaikan manajemen untuk meningkatkan efisiensi usaha, dan pengembangan jejaring kemitraan.
3. Pengembangan jiwa kewirausahaan terkait dengan optimasi peluang bisnis yang berbasis dan didukung oleh keunggulan lokal.
4. Peningkatan aksesibilitas terhadap modal, pasar, dan informasi.

Program pemberdayaan masyarakat pemerintah kelurahan di kelurahan Selat Tanjung Medan kecamatan Datuk Bandar Timur kota Tanjungbalai difokuskan pada kegiatan bina usaha. Adapun bina usaha yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan adalah usaha koperasi simpan pinjam, mengelola limbah kertas/ koran, mengembangkan nilai – nilai keterampilan (produksi jahit/ bordir, dan boga), dan memanfaatkan limbah kerang yang menjadi usaha utama di Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar

UNIVERSITAS MEDAN AREA. Melalui pemberdayaan kegiatan bina usaha

dilakukan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, sehingga terbebas dari kemiskinan. Hal tersebut merupakan tugas Lurah sebagai pemimpin dalam lingkup kelurahan yang bertanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakatnya sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu dalam pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat. Pemberdayaan masyarakat memiliki indikator-indikator untuk mengukur dan mengetahui sejauh mana pemberdayaan yang dilakukan pemerintah akan tercapai sesuai dengan harapan. Menurut Hatu (2015) menjelaskan bahwa dimensi-dimensi yang dapat dijadikan indikator pemberdayaan masyarakat dalam suatu negara disesuaikan dengan program pembangunan yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat yaitu:

a. Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi

Pendidikan dan Kesehatan Pemberdayaan masyarakat tidak terlepas dari pemenuhan kebutuhan kebutuhan. Kebutuhan ekonomi berkenaan dengan mutu pekerjaan masyarakat sedangkan di bidang pendidikan berkenaan dengan pengembangan ilmu pengetahuan.

b. Peningkatan Pendapatan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dapat dilihat pula dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Misalnya petani dapat meningkatkan hasil panennya sehingga menambah penghasilannya setiap bulan.

c. Partisipasi dalam pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat tampak pula pada partisipasi dalam

UNIVERSITAS MEDAN AREA, seperti pembangunan infrastruktur dalam bentuk

partisipasi ide pikiran, partisipasi bantuan dana maupun bantuan tenaga dalam pembangunan yang ada di desa. Sedangkan lima yang lainnya berkaitan dengan basis keberdayaan yakni:

- a. Pengembangan berbasis masyarakat.
- b. Keberlanjutan
- c. Partisipasi masyarakat
- d. Pengembangan modal sosial masyarakat.
- e. Penghapusan ketimpangan gender

2.2. Dasar Konseptual

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan dijelaskan tugas dan fungsi pemerintah kelurahan adalah:

1. PASAL 4 Tugas Pemerintah Kelurahan

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/ walikota.
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

UNIVERSITAS MEDAN AREA, prasarana, pembiayaan dan personil.

(5) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan bupati/ walikota dengan berpedoman pada peraturan menteri.

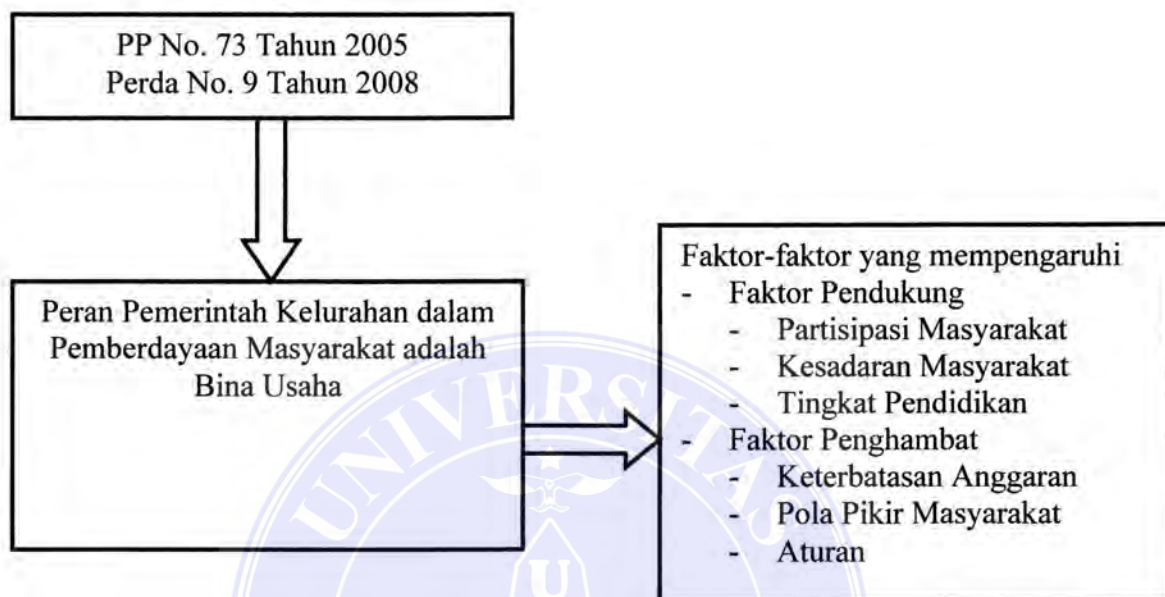
2. PASAL 5 Fungsi Pemerintah Kelurahan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, lurah mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelayanan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Inti dari Undang Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut adalah penyelenggaraan pemerintahan kelurahan menekankan pada prinsip demokrasi dan peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh daerah masing-masing untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan lurah Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur kota Tanjungbalai adalah kegiatan bina usaha. Dalam menganalisa pemberdayaan masyarakat tersebut penulis menggunakan teori Sulistiyani (2016) yang mencakup pada gambar dasar konseptual dalam penelitian ini.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat diuraikan pada sebuah hasil penelitian yang mencakup PP No. 73 tahun 2005 tentang kelurahan baik itu tugas dan fungsi pemerintah kelurahan yang ada di kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur kota Tanjungbalai. Sedangkan Perda No. 9 tahun 2008 menetapkan peraturan daerah masing – masing mengenai susunan dan kedudukan organisasi perangkat daerah, khususnya kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur kota Tanjungbalai. Adapun hasil dari peran pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat adalah bina usaha telah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat dalam peningkatan kehidupan masyarakat di kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk

Bandar Timur kota Tanjungbalai.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Dilaksanakannya bina usaha pada pengembangan usaha kelompok dengan memberikan pinjaman modal baik ditujukan untuk kelompok simpan pinjam maupun kelompok tani, bina usaha dibidang pertanian diwujudkan dengan berbagai macam bantuan yang diberikan baik pemberian modal ataupun dalam bentuk bantuan bibit, pupuk, serta ada pula asuransi padi yang tersedia tidak terlepas dari dua faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah:

- Faktor Pendukung
 - Partisipasi Masyarakat
 - Kesadaran Masyarakat
 - Tingkat Pendidikan
- Faktor Penghambat
 - Keterbatasan Anggaran
 - Pola Pikir Masyarakat
 - Aturan



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran faktual dengan argument yang tepat (Moleong, 2017). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran melalui proses analisis untuk memahami peran pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur kota Tanjungbalai. Salah satu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif data yang diperoleh seperti pengamatan, hasil wawancara, analisis dokumen, catatan lapangan yang disusun oleh peneliti dan tidak dituangkan dalam angka.

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

3.1.1. Tempat Penelitian

Adapun lokasi yang ditentukan dalam pelaksanaan penelitian terhadap peran pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat yaitu di Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur kota Tanjungbalai yang terdiri dari 8 Lingkungan yaitu: Lingkungan I, Lingkungan II, Lingkungan III, Lingkungan IV, Lingkungan V, Lingkungan VI, Lingkungan VII, dan

3.1.2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama \pm 5 bulan yaitu tanggal 07 November 2018 hingga tanggal 22 Maret 2019.

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan				
		Novem ber 2018	Desem ber 2018	Janu ari 2019	Feb ruari 2019	Ma ret 2019
1	Pengajuan Judul Proposal Tesis					
2	Penelitian Lapangan					
3	Seminar Usulan Penelitian					
4	Penulisan Tesis					

3.3. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini pihak yang dijadikan subjek penelitian adalah yang dianggap mempunyai informasi yang dibutuhkan di wilayah penelitian. Cara yang digunakan untuk menentukan informan kunci tersebut maka penulis menggunakan "*purposive sampling*" atau sampling bertujuan, yaitu teknik sampling yang digunakan oleh peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya (Arikunto, 2015). Menurut penulis, subjek dalam penelitian ini adalah :

1. Lurah

Wawancara dilakukan kepada lurah Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur kota Tanjungbalai adalah dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang siapa saja pengurus atau perangkat di kelurahan tersebut

beserta tugas dan wewenangnya, peran lurah terhadap pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, hukum, agama, dan kesehatan. Serta

UNIVERSITAS MEDAN AREA

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam memberdayakan masyarakat di Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur kota Tanjungbalai, pemecahan permasalahan dalam masyarakat.

2. Tokoh-tokoh masyarakat

Wawancara dilakukan kepada tokoh masyarakat kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur kota Tanjungbalai adalah dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang peran kepala lurah terhadap pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, hukum, agama dan kesehatan. Serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam memberdayakan masyarakat di Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur kota Tanjungbalai, pemecahan permasalahan dalam masyarakat.

3. Ketua Karang Taruna

Wawancara dilakukan kepada ketua karang taruna di kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur kota Tanjungbalai adalah dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang peran kepala lurah terhadap pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, hukum, agama, dan kesehatan khususnya untuk generasi muda. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam memberdayakan masyarakat di Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur kota Tanjungbalai, peranan kepala lurah dalam peningkatan kinerja perangkat Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur kota Tanjungbalai dalam memberdayakan

4. Ketua tim Penggerak PKK

Wawancara dilakukan kepada ketua penggerak PKK di kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur kota Tanjungbalai adalah dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang peran kepala lurah terhadap pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, hukum, agama, dan kesehatan khususnya bagi ibu dan balita dalam perbaikan gizi. Serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam memberdayakan masyarakat di Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur kota Tanjungbalai, peranan kepala lurah dalam peningkatan kinerja perangkat Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur kota Tanjungbalai dalam memberdayakan masyarakat.

5. Masyarakat

Wawancara dilakukan kepada beberapa masyarakat di kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur kota Tanjungbalai adalah dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang peran kepala lurah terhadap pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, hukum, agama, dan kesehatan. Serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam memberdayakan masyarakat di kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur kota Tanjungbalai.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
 © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
 Access From (repository.uma.ac.id)25/8/23

1) Wawancara mendalam (*indeep interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara *interview* langsung dengan informan yang paham dengan masalah yang sedang diteliti. Penulis melakukan wawancara langsung terhadap informan yang bersangkutan dengan masalah penelitian, wawancara antara informan dan peneliti *face to face* kemudian mengajukan beberapa pertanyaan yang menjadi inti masalah kepada informan. Selanjutnya informan memberikan jawaban sesuai dengan pemahaman mereka masing-masing terkait yang ditanyakan. Penelitian ini menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) agar wawancara yang dilakukan tetap berada pada fokus penelitian, meskipun tidak menutup kemungkinan akan adanya pertanyaan-pertanyaan yang berlanjut yang berhubungan dengan masalah penelitian.

2) Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti secara langsung ke instansi untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian.

3) Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

Penelitian Kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data serta mempelajari literatur-literatur yang ada berupa karya ilmiah, buku-buku, atau kepastakaan lain yang berhubungan erat dengan masalah yang terkait dengan penelitian ini.

4) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan berfokus pada sumber data tertulis. Dokumentasi berguna karena dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian. Sumber data tertulis terbagi dalam dua kategori yaitu sumber resmi yang merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga/ perorangan atas nama lembaga sedangkan sumber tidak resmi adalah dokumen yang dikeluarkan oleh individu tidak atas nama lembaga. Dokumen tersebut berupa artikel disurat kabar, artikel di internet dll.

3.5. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan analisis data kualitatif, yaitu bersifat menggambarkan temuan hasil penelitian secara utuh dengan menggunakan dasar-dasar teori yang ada. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses pengambilan data, kemudian data dari hasil wawancara dan observasi kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan kemudian disajikan ke hasil penelitian. Penyajian data dalam bentuk tabel, skema, grafik, maupun dalam bentuk narasi.

3.6. Keabsahan Penelitian

Penulisan tesis ini merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk

UNIVERSITAS MEDAN AREA Adminstrasi Publik di Program Pascasarjana

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)25/8/23

Universitas Medan Area. Sepanjang yang telah ditelusuri dari perpustakaan dan lingkungan Program Pascasarjana Universitas Medan Area, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara (USU) dan Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan (UNIMED) serta sepengetahuan dari penulis, tesis yang berjudul **“Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur kota Tanjungbalai”** belum pernah ditulis sebagai tesis, dan proposal tesis ini asli serta bukan plagiat ataupun diambil dari tesis orang lain. Semua ini merupakan implikasi etis dari sebuah proses penemuan kebenaran ilmiah. Sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Apabila ada tesis yang sama, maka akan dipertanggungjawabkan sepenuhnya oleh si penulis.

3.7. Prosedur Penelitian

Langkah prosedur penelitian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya diinterpretasikan secara deskriptif kualitatif untuk mengambil kesimpulan. Dalam penelitian ini kegiatan prosedur penelitian dilakukan dengan cara mengelompokan data yang diperoleh dari sumber data terkait dengan peranan pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur kota Tanjungbalai. Faktor pendukung dan penghambat dari peranan pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Selat Tanjung Medan

Universitas Medan Area
 Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur kota Tanjungbalai. Adapun aktivitas yang

dilakukan dalam prosedur penelitian ini yaitu; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu (Sugiyono, 2016). Dengan demikian pada penelitian ini data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan langkah setelah reduksi data, data didisplay atau disajikan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya (Sugiyono, 2016). Penyajian data ini merupakan kumpulan data dari sumber data atau informan dan memberikan kemungkinan untuk penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan selanjutnya. Dengan memahami sajian data ini, penulis mengetahui apa yang sedang terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan untuk menganalisis dan mengambil tindakan lain.

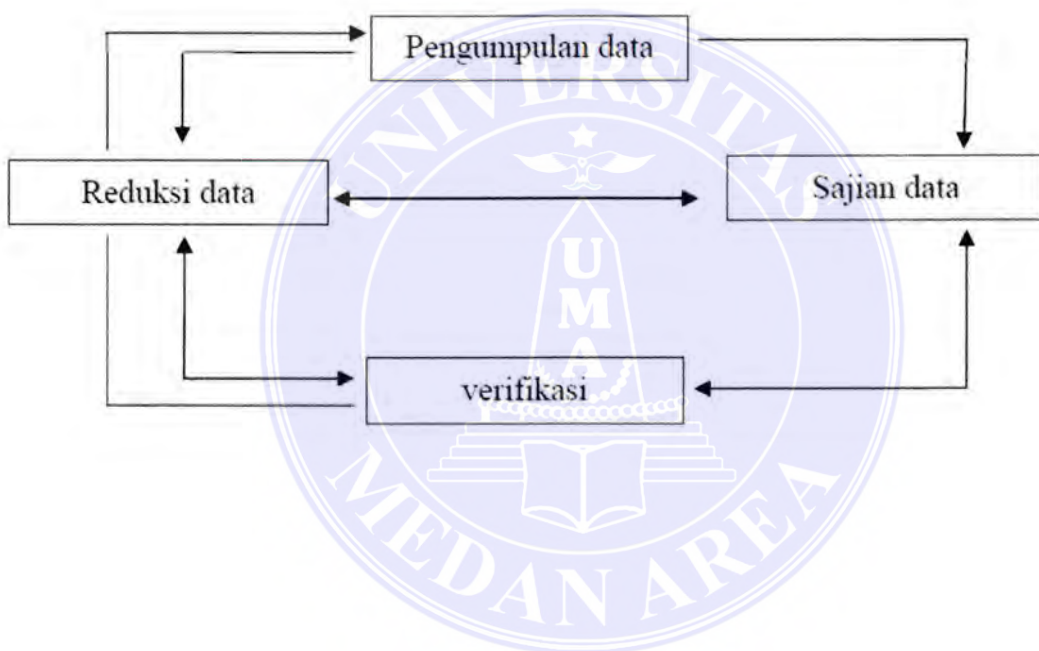
3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya (Sugiyono, 2016). Kesimpulan dalam penelitian

UNIVERSITAS MEDAN AREA merupakan temuan baru yang sebelumnya belum

pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Secara sistematis dijelaskan oleh Milles dan Huberman (2015) dengan model interaktif sebagai berikut :

Gambar 3.1 Model interaktif Miles dan Huberman



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pada Bab IV telah diuraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang Peranan Pemerintah Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Selat Tanjung Medan. Di samping itu pula dikemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi peranan pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan. Selanjutnya dalam Bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran-saran yang berhubungan dengan hasil penelitian.

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat penulis tarik adalah sebagai berikut :

1. Peranan pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari beberapa indikator, yakni bina usaha. Pemberdayaan masyarakat melalui bina usaha berfokus pada pengembangan usaha kelompok dengan memberikan pinjaman modal baik ditujukan untuk kelompok simpan pinjam maupun kelompok tani, bina usaha dibidang pertanian diwujudkan dengan berbagai macam bantuan yang diberikan baik pemberian modal ataupun dalam bentuk bantuan bibit, pupuk, serta ada pula asuransi padi yang tersedia.
2. Faktor yang mempengaruhi peranan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat terdiri dari :
 - a. Faktor pendukung

Faktor pendukung dalam pelaksanaan peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat terdiri dari partisipasi masyarakat, kesadaran masyarakat, dan tingkat pendidikan.

b. Faktor penghambat

Faktor penghambat dalam pelaksanaan peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat terdiri dari keterbatasan anggaran, pola pikir masyarakat dan aturan yang mengikat.

5.2. Saran

1. Peningkatan dan penguatan peranan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat harus lebih dioptimalkan, agar program pemberdayaan masyarakat yang ada di desa berjalan sesuai prakarsa masyarakat karena pada hakikatnya sasaran pembangunan dan pemberdayaan adalah kesejahteraan masyarakat agar tercapai hidup sejahtera semua warga masyarakat kelurahan Selat Tanjung Medan.
2. Untuk aparat pemerintah kelurahan tingkatkan kerjasama yang baik dan hubungan yang harmonis baik pada lembaga masyarakat maupun pada masyarakat dengan mengacu pada konsep keterlibatan masyarakat sehingga masyarakat tidak hanya dijadikan obyek dan pelaku dalam pemberdayaan masyarakat, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam menentukan dan membuat program pemberdayaan masyarakat.
3. Untuk pemerintah pusat lebih memperhatikan nasib kelurahan yang serba

UNIVERSITAS MEDAN AREA

.....kekurangan anggaran, tidak hanya desa yang menjadi perhatian mereka tapi

.....
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)25/8/23

juga kelurahan karena pada dasarnya semua orang ingin berubah dan perubahan disuatu daerah terletak dari seberapa besar peranan pemerintah didalamnya.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)25/8/23

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad. 2017. *Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional: Menuju Bangsa Indonesia yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi. Edisi Kedua*. Bandung: PT. Imperial Bhakti Utama
- Arikunto, S. 2015. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Friedman, Adisasmita. 2015. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hatu, Rauf . 2015. *Pemberdayaan dan Pendampingan Sosial Masyarakat*. Jurnal inovasi: Gorontalo.
- Kartasasmita, Ginandjar. 2016. *Ekonomi Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. CIDES: Jakarta.
- Korten, David C. 2016. *Pembangunan yang Memihak Rakyat*. Jakarta Lembaga Studi Pembangunan Masyarakat dan Desa/Kelurahan
- Mardikanto dan Soebianto. 2016. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. ALFABETA: Bandung.
- Miles, B.B., dan A.M. Huberman. 2015. *Analisa Data Kualitatif*. UI: Press Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset: Bandung.
- Sarundajang, S.H. 2016. *Babak Baru Sistem Pemerintahan*. Kata Hasta Pustaka: Jakarta.
- Soemantri, Bambang. 2017. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Fokusmedia: Bandung.
- Suharto, Edi. 2016. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2016. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gava Media.
- Sumodiningrat, Gunawan. 2016. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan*. CV. Alfabeta: Bandung.

Usman, Sunyoto. 2016. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Vindyandika. 2017. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Penerbit Centre for Strategic and International Studies.

Wolcook dan Narayan. 2016. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Widjaja, HAW. 2018 *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia: Dalam Rangka Sosialisasi UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wrihatnolo, Randy R dan Riant Nugroho Dwidjowijoto. 2017. *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Media Komputindo.

Sumber Lainnya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 120 ayat 2, UU 32 tahun 2014 tentang konteks otonomi daerah perangkat daerah

Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 tentang Lurah yang bertatus sebagai Pegawai Negeri Sipil

Undang – Undang Nomor 23 tahun 2016 pada pasal 229 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 229 ayat 3 Undang-undang 23 tahun 2014 tentang tugas lurah

Peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan

Undang – Undang Nomor 23 tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tugas Pokok Kelurahan

Perda No. 9 tahun 2008 menetapkan peraturan daerah masing – masing mengenai susunan dan kedudukan organisasi perangkat daerah